



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Ristekdikti RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Maret 2016.
Pukul	: 10.00 WIB – 16.00
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E.,M.M. /Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015;2. Persiapan dan Kesiapan dan Pelaksanaan APBN Tahun 2016;3. Implementasi Hasil Panja BOPTN;4. Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi dan LPTK;5. Realisasi Hibah PTS;6. Proses dan Penetapan Kepangkatan Dosen;7. Lain-Lain.
Hadir	: 28 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Prof. Mohamad Nasir/Menteri Ristekdikti beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.10-16.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Ferdiansyah, S.E.,M.M., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Ristekdikti RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015

Komisi X DPR RI menilai bahwa daya serap APBN 2015 Kemenristekdikti RI baru tercapai sebesar 82,35% masih rendah. Hal ini dikarenakan diantaranya pemisahan DIPA dari Kemdikbud RI efektif berlaku pada bulan juli 2015. Selanjutnya Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk mengantisipasi kendala-kendala yang akan terjadi dalam penyerapan APBN agar daya serap APBN TA 2016 tercapai sesuai target.

2. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2016

Terkait dengan pelaksanaan APBN tahun 2016, Komisi X DPR RI memberikan catatan sebagai berikut:

- a. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk menjaga pelaksanaan beasiswa bidik misi tepat sasaran.
- b. Pelaksanaan APBN TA 2015 supaya dijadikan referensi untuk pelaksanaan APBN TA 2016 agar daya serapnya lebih baik.
- c. Terhadap pengembangan STP (*Science Technology Park*) Kemenristekdikti RI perlu melakukan pengawasan yang intensif.
- d. Penjelasan terhadap klarifikasi masih adanya perbedaan antara bahan Raker tanggal 10 Februari 2016 dengan RKA-KL TA 2016 belum optimal, maka masih diperlukan penjelasan lebih lanjut.

3. Implementasi Hasil Panja BOPTN

- a. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk melaksanakan rekomendasi dari Panja BOPTN Komisi X DPR RI, terutama terkait dengan rumus perhitungan alokasi, penggunaan dan pencairan dana serta alokasi anggaran penelitian.
- b. Terkait realisasi BOPTN pada APBN TA 2016 Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan laporan dan evaluasi berkala minimal 3 bulan sekali.
- c. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk melakukan terobosan strategis agar BOPTN lebih bermanfaat untuk Perguruan Tinggi Negeri (Mahasiswa, Dosen dan Operasional Perguruan Tinggi).

4. Komisi X DPR RI dengan Kemenristekdikti RI telah menyepakati kesimpulan agenda Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015, Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2016, dan Implementasi Hasil Panja BOPTN untuk agenda lainnya yang belum selesai yaitu tentang Permasalahan Beasiswa dan LPTK, Realisasi Hibah PTS, Proses dan Penetapan Kepangkatan Dosen dan lain-lain akan dilanjutkan pada tanggal 16 atau 17 Maret 2016.

3. PENUTUP

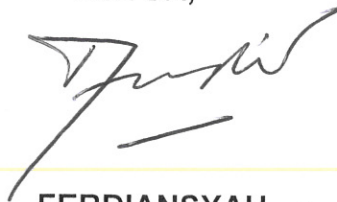
Rapat ditutup pada pukul 16:00 WIB

MENTERI RISTEKDIKTI RI,



MOHAMAD NASIR

KETUA,



FERDIANSYAH